

BAB I

PENDAHULUAN

1.1.Latar Belakang Masalah

Upaya pemerintah dalam mendorong transparansi dalam informasi lembaga publik dan meningkatkan layanan publik tercantum dalam wacana pelaksanaan *e-government*. Di Indonesia secara tidak resmi kebijakan tersebut telah diselenggarakan sejak tahun 2001, kemudian diperkuat melalui Intruksi Presiden (Inpres) Nomor 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Pengembangan *E-Government*, Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, dan Intruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2003 tentang Tim Koordinasi Telematika Indonesia (TKTI). Dalam Inpres tersebut disebutkan bahwa tujuan dari adanya tim koordinasi tersebut yakni guna mengkoordinasi serta mendorong pengembangan khususnya dalam bidang teknologi informasi di jajaran pemerintahan, bidang bisnis serta publik. Tentunya dari Inpres tersebut dimaksudkan bagi lembaga pemerintah (pemerintah daerah hingga pemerintah desa) untuk dapat meningkatkan daya saing teknologi baik secara lokal maupun global.

Hasil pemanfaatan teknologi digital (*Electronic Digital Service*) telah melahirkan mekanisme birokrasi baru, yang disebut dengan *Electronic Government (E-Government)*. Dari berbagai macam definisi mengenai *E-Government*, kebijakan tersebut mempunyai tujuan dalam mentransformasikan interaksi antara pemerintah dengan masyarakat agar lebih

partisipatif dan intensif dalam pelayanan. Total dari 190 negara di dunia, Indonesia berada di peringkat 116 yang turun 10 peringkat dari tahun 2014 berdasarkan *United Nations E-Government Development Database* (2016). Posisi tersebut terpaut cukup jauh bila dibandingkan dengan Singapura yang berada pada posisi 4 pada tahun 2016, serta Malaysia yang berada pada posisi 60 pada tahun 2016. Berikut merupakan tabel yang menunjukkan perbandingan atau peringkat *e-government* di tingkat ASEAN :

Tabel 1.1. Indeks *E-Government* di Negara-Negara ASEAN

Negara	Ranking		Indeks	Perubahan
	2014	2016		
Singapura	3	4	0,8828	-1
Malaysia	52	60	0,6175	-8
Filipina	95	71	0,5766	+24
Thailand	102	77	0,5522	+25
Brunei Darussalam	86	83	0,5298	+3
Vietnam	99	89	0,5143	+10
Indonesia	106	116	0,4478	-10
Laos	152	148	0,3090	+4
Kamboja	139	158	0,2593	-19
Myanmar	175	169	0,2362	+6

Sumber : *United Nations E-Government Development Database* (2016)

Kondisi pemanfaatan *e-government* di Indonesia sangat bervariasi, namun dalam peraturan dijelaskan mengenai pelaksanaannya. Definisi *e-government* masih sebatas pengembangan *website*, sehingga pada awal penerapannya seringkali dimaknai dengan dengan penyediaan *website* meskipun dewasa ini di kembangkan dengan berbagai aplikasi. Dalam implementasinya terlihat sangat baik dalam tahap persiapan, artinya hampir setiap instansi pemerintah memiliki *website* dan proses informasi diperbarui secara terus-menerus (Sosiawan, 2008). Menurut Rokhman

(dalam Dewi, 2011:97-98) beberapa lembaga dan pakar mengemukakan bahwa terdapat 4 (empat) faktor level pengembangan *e-government* yaitu level informasi, level interaksi, level transaksi, dan level integrasi.

Untuk mewujudkan prinsip *good governance*, Pemerintah Kabupaten Bantul telah mengimplementasikan program berbasis teknologi dari pusat hingga ke tingkat desa. Pengembangan *e-government* dapat diklasifikasikan berdasarkan tingkat kompleksitas pengembangan serta sarana dan prasarana pelayanan publik. Menurut Riset Teknologi dan Informasi Indonesia (2017) transformasi pengembangan *government to e-government* diterapkan dalam layanan berbasis elektronik desa, yang merupakan salah satu upaya peningkatan pelayanan prima kepada publik (masyarakat). Sistem Informasi Desa (SID) merupakan kumpulan dari berbagai teknologi informasi dan perangkat lunak (*software*) yang dapat dioperasikan oleh perangkat desa untuk meningkatkan kecepatan dalam kualitas pelayanan publik kepada masyarakat (Dewi, 2011:99). Keberadaan SID disambut positif oleh Pemerintah Desa, mengingat program ini memberikan manfaat yang nyata dalam rangka pendataan dan pelayanan publik yang ada di desa. SID telah menjadi sesuatu yang bernilai ketika realisasinya telah menyentuh kegunaan sehari-hari pemerintah desa seperti pengelolaan dokumen-dokumen desa, surat-menyurat, pelayanan kepada masyarakat desa, dan kegiatan terkait desa lainnya. SID memberikan langkah pasti untuk menjadikan sistem

informasi desa sebagai sesuatu yang melekat dalam kebutuhan sehari-hari (Ranggoaini, dkk., 2012:22).

Desa menjadi salah satu sasaran dalam pelaksanaan pembangunan nasional yang dapat mengubah suatu kondisi masyarakat kearah yang lebih baik di berbagai aspek kehidupan. Berdasarkan data dari (Kantor Pengelolaan Data Telekomunikasi, 2016) pada tahun 2015, desa di Kabupaten Bantul telah memiliki Sistem Informasi Desa (SID) dari yang sebelumnya dari total 75 desa yang ada, terdapat 12 desa yang menerapkan SID. Selain upaya dari pemerintah kabupaten, peran dalam bentuk sosialisasi, pelatihan, dan *workshop* juga dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Bantul yang bekerjasama dengan lembaga *Combine Resources Institution* (CRI).

Basis data pada SID dapat memperbaiki metode pengolahan data serta perbaikan sumber daya aparatur desa melalui rekrutmen dan manajemen aparatur desa. Seperti pada fitur profil desa merupakan data statis yang dapat mendorong kemudahan pemerintah desa dalam pengelolaan layanan administratif serta dapat mengetahui dan memahami informasi-informasi yang tertera di *website* desa. Selain itu dalam fitur layanan mandiri dapat memudahkan pelayanan secara *online* melalui *website* desa. Pada level organisasi, SID dapat meningkatkan manajemen keuangan desa seperti dengan adanya BUMDes yang dapat meningkatkan perekonomian desa dan mengembangkan masyarakat melalui penguatan kerjasama antar desa (Ranggoaini, dkk., 2012:6).

Secara administratif Desa Murtigading merupakan desa yang menjadi *pilot project* dalam penerapan SID terletak di Kecamatan Sanden, Kabupaten Bantul. Desa yang berada di jantung kecamatan ini memiliki potensi besar terutama sebagai pengembangan kawasan perkotaan karena memiliki daerah strategis. Hampir seluruh kantor instansi pemerintah Kecamatan Sanden berada di wilayah ini. Pemerintah Desa Murtigading juga memiliki peranan aktif dalam pengembangan aplikasi SID karena sejak tahun 2015 dan meraih predikat kedua di tingkat kabupaten dengan pengelolaan *website* berdasar berita atau artikel terbanyak dan termutakhir pada tahun kedua penerapan aplikasi SID, yakni pada tahun 2016.

Berdasarkan uraian latar belakang yang dikemukakan di atas, maka peneliti memilih judul ***Penataan Lembaga Pemerintah Desa Berbasis E-Government di Desa Murtigading, Kecamatan Sanden, Kabupaten Bantul***. Hal tersebut bertujuan untuk menganalisis penataan lembaga Pemerintah Desa Murtigading untuk menjawab kebutuhan riil masyarakat seperti dalam hal pelayanan, sehingga bukan hanya sebagai kepentingan semata. Penting bagi lembaga pemerintah desa dalam memahami secara mendalam bahwa suatu kondisi dan berbagai elemen sosial kemasyarakatan yang memiliki potensi positif sebagai penggerak sebuah inovasi teknologi seperti dalam penerapan aplikasi SID. Pemahaman mendalam tentang peran dan fungsi suatu lembaga dalam tatanan sosial masyarakat, anggaran SID di lembaga pemerintah desa, fasilitas serta kebutuhan pelayanan tentunya dianggap perlu. Penguatan kelembagaan

mengarah kepada pencapaian program SID harus sejalan dengan tujuan pembangunan setempat.

1.2.Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah, maka penulis mengambil rumusan masalah sebagai berikut :

Bagaimana Penataan Lembaga Pemerintah Desa Berbasis *E-Government* di Desa Murtigading, Kecamatan Sanden, Kabupaten Bantul?

1.3.Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah, maka tujuan penelitian sebagai berikut :

Untuk mengetahui Penataan Lembaga Pemerintah Desa Berbasis *E-Government* di Desa Murtigading, Kecamatan Sanden, Kabupaten Bantul.

1.4.Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian yang telah dilakukan baik secara praktis maupun teoritis adalah sebagai berikut :

1.4.1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis diharapkan penelitian ini dapat menambah referensi dan dapat berguna bagi pengembangan tata kelola pemerintahan.

1.4.2. Manfaat Praktis

a. Bagi instansi

Diharapkan penelitian ini dapat dijadikan bahan analisis penataan bagi lembaga pemerintah desa berbasis *e-governement* di Kabupaten Bantul.

b. Bagi peneliti

Diharapkan dapat menambah pengetahuan bagi peneliti sehingga dapat mengaplikasikan teori selama proses perkuliahan dan penelitian. Serta dapat menambah wawasan dan menjadi salah satu rujukan bagi penelitian lebih lanjut.

c. Bagi masyarakat

Diharapkan dapat menjadi bahan masukan bagi masyarakat agar dapat berpartisipasi aktif dalam setiap program kerja pemerintah, sehingga dapat turut ikut serta dalam mengevaluasi kinerja lembaga desa berbasis *e-government*.

1.5. Tinjauan Pustaka

Dalam subbab tinjauan pustaka akan dijabarkan beberapa penelitian yang berkaitan dengan penelitian ini, serta akan dicari persamaan dan perbedaannya agar menghindari persamaan maupun penduplikasian penelitian, berikut penjabarannya :

No.	Penelitian	Judul	Temuan
1.	Ambar Sari Dewi (2011)	Membuat <i>E-Government</i> Bekerja di Desa: Analisis <i>Actor Network Theory</i> Terhadap Sistem Informasi Desa dan Gerakan Desa Membangun)	Dalam penelitian ini membahas mengenai inisiasi desa dalam pengembangan <i>e-government</i> yang sesuai dengan potensi dari masing-masing desa melalui Gerakan Desa Membangun (GDM) dan Sistem Informasi Desa (SID). Hal tersebut dipilih karena inisiatif tersebut dapat berkembang secara cepat dan dapat mengubah cara pandang masyarakat desa terhadap tata pengelolaan informasi. Dengan menggunakan <i>Actor Network Theory</i> (ANT), peneliti percaya bahwa <i>e-government</i> desa dapat bekerja secara optimal bila beberapa syarat dapat terpenuhi, dapat mensosialisasikan gagasan serta mampu berpartisipasi dalam proses pelaksanaan <i>e-government</i> yang diterapkan di desa.
2.	Sugeng Bayu Wahyono (2011)	Optimalisasi Program Desa Informasi Melalui Penguatan Kelembagaan	Konsep pengelolaan dan pengembangan Desa Informasi perlu mempertimbangkan anggapan batasan sosial agar dapat melihat karakter <i>bottom-up</i> . Sehingga dalam penetapan desa sebagai desa informasi dibutuhkan langkah-langkah seperti identifikasi lokasi, lembaga publik di wilayah tersebut, kesediaan mandiri serta adanya kaitan antar lembaga secara vertikal maupun horizontal. Melalui langkah-langkah dari bawah ke atas, maka pengelolaan dan pengembangan program Desa Informasi akan mampu memberdayakan warga masyarakat desa.
3.	Drs. Sulismadi, M.Si., Dr. Wahyudi, M.Si., & Dr. Muslimin, M.Si. (2016)	Model Penguatan Kapasitas Pemerintah Desa dalam Menjalankan Fungsi Pemerintahan Berbasis <i>Electronic Government</i> (<i>E-government</i>) menuju Pembangunan Desa Berdaya Saing.	Penerapan konsep <i>e-government</i> dalam menyelenggarakan pemerintahan desa pada awalnya dinilai telah berhasil. Namun, konsep tersebut tidak dapat dikembangkan dengan baik karena minimnya sumber daya manusia profesional pada bidang informasi dan teknologi, dan minimnya anggaran operasional untuk program tersebut. Sehingga, tim peneliti melakukan <i>Focus Group Discussion</i> (FGD)

			pengembangan konsep <i>e-government</i> .
4.	Bambang Dwi Anggono (2008)	<i>Government E-Service Village</i> di Kabupaten Bantaeng	Penerapan <i>e-service</i> di tingkat desa tidak berbeda dengan konsep umum penerapan unit pelayanan satu atap (<i>One Stop Service</i>), tetapi di Indonesia seringkali ditempatkan pusat pemerintahan. Dengan menggunakan <i>Service Oriented Architecture</i> (SOA) dapat diimplementasikan dalam model pelayanan pemerintah berbasis desa maupun pengembangan integrasi <i>e-government</i> .
5.	Arib Hilmy Raihan, Dr. Muh. Jamal Amin, & M. Sidan Melati Dama, S. Sos., M.Si (2017)	Efektivitas Kebijakan Penerapan Aplikasi Sistem Informasi Desa Dan Kelurahan (Si-Daleh) Di Desa Rapak Lambur Kecamatan Tenggarong Kabupaten Kutai Kertanegara	Penelitian ini lebih kepada pengukuran tingkat efektivitas kebijakan yang diterapkan di desa dan kelurahan. Terdapat beberapa indikator, <i>pertama</i> , sumber daya dinilai sangat efektif setelah melakukan pelatihan, <i>kedua</i> , dana dan fasilitas penunjang sesuai dengan standar untuk menerapkan aplikasi, <i>ketiga</i> , memberikan pelayanan terpadu, <i>keempat</i> , waktu menjadi efektif dan efisien, <i>kelima</i> , sosialisasi kepada masyarakat.
6.	Ferdi Aprianto (2006)	Analisa Dan Perancangan <i>E-Goverment</i> Pada Desa Sriwaylangsep	Terbangunnya sistem <i>e-government</i> bertujuan untuk memanfaatkan teknologi informasi mengenai keadaan pemerintahan desa, keadaan dan potensi desa. Melalui basis <i>e-government</i> maka terbentuk suatu <i>database</i> pemerintahan, potensi desa, dan pendukung peluang investasi yang datanya bersumber dari desa. Secara <i>up to date</i> masyarakat juga dapat mengakses data secara <i>online</i> . Namun, dari sisi sumber daya pengelola hendaknya dapat meningkatkan mutu secara maksimal.
7.	Yuniadi Mayowan (2017)	Penerapan Teknologi Informasi dan Komunikasi di Desa (Studi Kasus di Kabupaten Lamongan)	Penerapan dan pengembangan Teknologi Informasi (IT) dalam aspek pelayanan masih belum maksimal dan belum adanya pemerataan. Selain pengembangan IT, aspek pelayanan publik juga belum sepenuhnya menyentuh masyarakat serta SDM pengelola berbasis elektronik juga masih terbatas.

8.	Novie Indrawati Sagita (2017)	Pemanfaatan Teknologi Informasi Dalam Penilaian Kinerja Kecamatan Dan Kelurahan Di Kota Bandung	Upaya peningkatan kinerja camat dan lurah harus didukung sumber daya manusia yang berkualitas dengan jumlah yang memadai dan sesuai kebutuhan organisasi, agar dapat memberikan capaian hasil kinerja secara maksimal. Selain itu, pemberian bimbingan dan teknik (bimtek) Sistem Informasi Penilaian (SIP) tidak memberikan manfaat yang optimal bilamana SDM aparatur yang memperoleh bimtek tersebut harus pindah baik karena rotasi, mutasi maupun promosi.
9.	Tri Widodo W. Utomo & Andi Wahyudi (2008)	Penataan Kewenangan (Urusan) Pemerintahan Desa dan Pengembangan Standar Pelayanan Minimal (SPM)	Pemerintah desa biasanya menyediakan 3 (tiga) aspek pelayanan administrasi, barang, dan jasa. Selain sumber daya seperti anggaran, SDM, dan fasilitas yang masih terbatas, juga disebabkan dengan belum jelasnya kewenangan atau urusan desa. Karena setiap desa memiliki potensi yang berbeda-beda, maka penetapan SPM bagi pelayanan juga tidak dapat diseragamkan di seluruh desa di Indonesia karena desa di Indonesia bersifat heterogen.
10.	Triyani Arita Fitri, Torkis Nasution, & Herwin (2015)	Pengembangan Model Pelayanan Kantor Desa terhadap Masyarakat Berbasis <i>Mobile Computing</i>	Penelitian ini menggunakan pengembangan sistem administrasi pelayanan administrasi <i>online</i> berbasis <i>open source</i> dengan pendekatan <i>cloud computing</i> . Selain itu, sistem permodelan seperti pengembangan model layanan desa <i>online</i> , pengembangan model pelaporan keuangan <i>online</i> , dan pengembangan model konsultasi administrasi secara <i>online</i> .

Sumber : Diolah dari Berbagai Sumber

Berdasarkan tabel di atas memberikan perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian ini. Penelitian terdahulu memberikan perbedaan seperti penelitian oleh Ambar Sari Dewi (2011) memberikan

pemahaman bahwa inisiasi desa dalam pengembangan *e-government* yang sesuai dengan potensi dari masing-masing desa melalui Gerakan Desa Membangun (GDM) dan Sistem Informasi Desa (SID) dapat berkembang secara cepat dan dapat mengubah cara pandang masyarakat desa terhadap tata pengelolaan informasi. Penelitian oleh Sugeng Bayu Wahyono (2011) menemukan bahwa konsep pengelolaan dan pengembangan Desa Informasi perlu mempertimbangkan anggapan batasan sosial agar dapat melihat karakter *bottom-up* karena akan mampu memberdayakan warga masyarakat desa. Kemudian penelitian oleh Drs. Sulismadi, M.Si., Dr. Wahyudi, M.Si., dan Dr. Muslimin, M.Si. (2016) yakni konsep *e-government* tidak dapat dikembangkan dengan baik jika minimnya sumber daya manusia profesional pada bidang informasi dan teknologi, dan minimnya anggaran operasional. Mengenai penelitian oleh Bambang Dwi Anggono (2008) bahwa dengan menggunakan *Service Oriented Architecture* (SOA) dapat diimplementasikan dalam model pelayanan pemerintah berbasis desa maupun pengembangan integrasi *e-government* lainnya. Arib Hilmy Raihan, Dr. Muh. Jamal Amin, dan M. Sidan Melati Dama, S. Sos., M. Si (2017) mengemukakan bahwa terdapat beberapa indikator efektivitas *e-government*, *pertama*, sumber daya manusia, *kedua*, dana dan fasilitas, *ketiga*, memberikan pelayanan terpadu, *keempat*, waktu menjadi efektif dan efisien, *kelima*, sosialisasi kepada masyarakat.

Selanjutnya temuan dari Ferdi Aprianto (2006) bahwa melalui basis *e-government* maka terbentuk suatu *database* pemerintahan, potensi

desa, dan pendukung peluang investasi yang datanya bersumber dari desa. Temuan dari Yuniadi Mayowan (2017) adalah pengembangan IT dan pelayanan publik belum sepenuhnya menyentuh masyarakat serta SDM pengelola berbasis elektronik juga masih terbatas. Kemudian penelitian yang dilakukan oleh Novie Indrawati Sagita (2017) yakni upaya peningkatan kinerja camat dan lurah harus didukung sumber daya manusia yang berkualitas dengan jumlah yang memadai dan sesuai kebutuhan organisasi agar dapat memberikan capaian hasil kinerja secara maksimal. Temuan dari Tri Widodo W. Utomo dan Andi Wahyudi (2008) adalah setiap desa memiliki potensi yang berbeda-beda, maka penetapan SPM bagi pelayanan juga tidak dapat diseragamkan di seluruh desa di Indonesia karena desa di Indonesia bersifat heterogen. Kemudian penelitian oleh Triyani Arita Fitri, Torkis Nasution, dan Herwin (2015) mengemukakan bahwa pengembangan model layanan desa *online*, pengembangan model pelaporan keuangan *online*, dan pengembangan model konsultasi administrasi secara *online* dapat meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

Sedikit berbeda dengan penelitian sebelumnya. Pada penelitian ini akan menganalisis mengenai penerapan bentuk koordinasi di lembaga pemerintah desa serta menilik sejauh mana tingkat kesiapan sumber daya manusia dalam menerima gagasan dan menjalankan kebijakan ini. Beberapa aspek dalam penataan kelembagaan dapat mewujudkan pola kelembagaan yang rasional, efisien, dan profesional. Tentunya, melalui

lembaga pemerintah desa diharapkan mampu melaksanakan pembangunan berkemajuan khususnya dari sisi kemampuan teknologi untuk mewujudkan keterbukaan informasi serta meningkatkan kinerja lembaga maupun individu pelaksanaannya.

1.6. Kerangka Dasar Teori

1.6.1. Kelembagaan

A. Definisi Kelembagaan

Hendropuspito (dalam Wibawa, 2017) yang menyebut lembaga dengan sebutan institusi ini mengemukakan bahwa institusi merupakan suatu bentuk organisasi yang secara tetap tersusun dari pola kelakuan, peranan dan hubungan (*relation*). Hal tersebut merupakan sebuah cara yang mengikat guna tercapainya berbagai kebutuhan dasar sosial.

Menurut Nasution (dalam Wibawa, 2017) kelembagaan dapat diartikan sebagai wadah dan sebagai norma. Lembaga atau institusi merupakan aturan, prosedur, norma / perilaku individual, dan sangat penting artinya. Dapat dikemukakan bahwa kelembagaan mempunyai 2 (dua) pengertian yang berbeda, yakni sebagai aturan main (*rule of the game*) dan sebagai suatu lembaga yang memiliki hierarki.

Mencermati ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah, maka terdapat 3 (tiga) institusi utama yang mewadahi masyarakat desa, yaitu :

1. Pemerintah Desa sebagai unsur pelaksana dalam mencanangkan berbagai program pembangunan, pelayanan, pembinaan, dan pemberdayaan masyarakat desa.
2. Badan Perwakilan Desa (BPD) sebagai lembaga legislatif desa yang berfungsi menampung, menyalurkan serta mewujudkan aspirasi dan kepentingan masyarakatnya dalam penetapan kebijakan yang akan dilaksanakan oleh pemerintah desa.
3. Lembaga Kemasyarakatan Desa seperti LKMD, karang taruna, PKK dan kelompok masyarakat lainnya yang bekerjasama dengan pemerintah desa dalam mengupayakan terwujudnya pemberdayaan masyarakat dan menampung / mengakomodasi aspirasi kebutuhan dan tuntutan masyarakat dalam bidang pembangunan, menyelenggarakan layanan pemerintahan serta menumbuhkembangkan partisipasi dan semangat gotong-royong masyarakat desa.

B. Karakteristik Kelembagaan

Adapun karakteristik kelembagaan untuk mencapai tujuan negara diungkapkan oleh Widodo (dalam Thaha, 2009) bahwa kelembagaan publik saat ini harus dapat bekerja secara efisien,

efektif, kompetitif, responsif, dan adaptif. Selain itu, kelembagaan publik diharuskan untuk mempunyai struktur dan prosedur yang fleksibel, mempunyai kemampuan untuk mengembangkan diri dan menyesuaikan diri dalam keadaan yang bersifat dinamis / dari ketidakpastian lingkungan.

Selain itu Max Weber (dalam Thaha, 2009) juga mengungkapkan 8 (delapan) ciri atau karakteristik kelembagaan. Kewenangan yang berjenjang sesuai dengan tingkatan organisasi yakni (1) spesialisasi tugas, kewajiban, dan tanggung jawab, (2) posisi didesain sebagai jabatan, (3) penggantian dalam jabatan secara terencana, (4) jabatan bersifat impersonal, (5) suatu sistem aturan dan prosedur yang standar untuk menegakkan disiplin, (6) pengendaliannya aturan dan prosedur, (7) kualifikasi yang rinci mengenai individu yang akan memangku jabatan, dan (8) perlindungan terhadap SDM dari pemecatan. Kemampuan untuk menunjukkan ciri tersebut tergantung pada pelaku kelembagaan atau aparat untuk berfikir dinamis dan berupaya untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Untuk itu setiap aparat hendaknya memiliki semangat kerja yang tinggi serta didukung oleh sumberdaya dan dana dalam pencapaian tujuan.

C. Kategori Kelembagaan

Menurut Alfian (dalam Thaha, 2009) kelembagaan dibedakan menjadi 3 kategori yakni :

1. Kelembagaan pemerintahan umum

Merupakan sebuah rangkaian organisasi pemerintah yang melaksanakan tugas-tugas pemerintahan umum seperti dalam memelihara ketertiban dan keamanan dari tingkat pusat sampai daerah (provinsi, kabupaten, kecamatan dan desa). Sehingga, tugas-tugas tersebut bersifat regulasi (*regulative function*).

2. Kelembagaan pembangunan

Lembaga pemerintahan yang menyelenggarakan salah satu sektor khusus yang bertujuan dalam mencapai tujuan pembangunan, seperti pertanian, kesehatan, pendidikan, industri, dan lain-lain. Kelembagaan pembangunan memiliki fungsi pokok, yakni fungsi pembangunan (*development function*) atau fungsi adaptasi (*adaptive function*).

3. Kelembagaan pelayanan

Unit organisasi yang merupakan bagian yang langsung memiliki hubungan dengan masyarakat. Dalam kategori kelembagaan ini dapat disebutkan antara lain rumah sakit, sekolah, kantor koperasi, bank rakyat tingkat desa, kantor atau unit pelayanan departemen sosial, transmigrasi, dan

berbagai unit organisasi lainnya yang memberikan pelayanan langsung kepada masyarakat atas nama pemerintah. Sehingga memiliki fungsi utama sebagai fungsi pelayanan (*service*) langsung kepada masyarakat.

D. Aspek Penataan Kelembagaan

Pernyataan Pratikno, dkk., (dalam Utomo, 2008) bahwa keberadaan lembaga pemerintah desa merupakan penyedia layanan yang menjadi kebutuhan masyarakat desa. Pelayanan yang diselenggarakan oleh pemerintah desa terdiri dari layanan administrasi, barang, dan jasa. Dari ketiga aspek layanan tersebut jika salah satunya tidak terpenuhi, dapat mengurangi tingkat kepercayaan masyarakat kepada pemerintah desa. Berikut rincian ketiga jenis layanan bagi pemerintah desa :

1. Layanan Administrasi

Merupakan layanan administrasi kependudukan, surat kepindahan, surat kelahiran, surat kepemilikan kekayaan dan aspek administrasi penting lainnya.

2. Layanan Barang

Deangan menggunakan kewenangan pemerintah desa yang didukung lembaga-lembaga desa yang dimiliki, serta berbagai sumber keuangan yang memadai dapat mengadakan fasilitas / sarana dan prasarana umum yang dibutuhkan masyarakat desa. Layanan yang termasuk dalam kelompok barang meliputi sarana

jalan, saluran irigasi, gedung pemerintahan desa, peralatan kantor pemerintahan desa, gedung pertemuan masyarakat, dan lain sebagainya.

3. Layanan Jasa

Layanan jasa diterapkan di desa dapat berupa penyediaan kegiatan sekolah, Posyandu bagi balita, pendampingan masyarakat dalam bertani, dan lain sebagainya.

Dawud (2006) menjelaskan bahwa kelembagaan daerah tidak hanya mengacu dari aspek kewenangan, tetapi harus melihat aspek lain agar pola kelembagaan rasional, efisien, dan rasional. Menurutnya, aspek-aspek dalam penataan kelembagaan daerah bersifat kualitatif, yakni sulit diukur atau dihitung secara matematis karena berkaitan dengan nilai (*value*). Aspek kualitatif yang dimaksud adalah nilai strategis daerah dan teknologi. Selain itu terdapat aspek kuantitatif, yakni aspek yang dapat diukur atau dihitung, seperti kebutuhan pelayanan, Sumber Daya Manusia (SDM), keuangan, dan kewenangan. Berikut penjabarannya :

1. Kewenangan

Pemerintah, swasta, dan masyarakat dapat melimpahkan kewenangan kepada daerah. Dalam penataan kelembagaan daerah dapat dianalisis terlebih dahulu oleh kewenangan daerah. Berikut beberapa jenis pelaksanaan kewenangan :

- a. Kewenangan diselenggarakan sepenuhnya oleh pemerintah daerah atau dimonopoli oleh pemerintah. Hal tersebut berkaitan erat dengan pembuatan kebijakan
- b. Kewenangan diselenggarakan secara bersama-sama (pemerintah, swasta, dan masyarakat). Hal tersebut berkaitan erat dengan pelaksanaan kegiatan (pembangunan dan pelayanan)
- c. Kewenangan dipilah antara kewenangan yang dibiayai oleh pemerintah yang pelaksanaannya dilakukan oleh swasta atau masyarakat dan kewenangan yang menjadi beban dan tanggungjawab masyarakat.

Berdasarkan keterangan di atas, maka kewenangan tidak dapat dimonopoli (diatur dan diselenggarakan) oleh pemerintah karena peran pemerintah sangat dibutuhkan apabila sektor swasta dan masyarakat belum berdaya.

2. Sumber Daya Manusia

Adanya SDM yang memenuhi kapasitas dapat mendorong tercapainya tujuan kelembagaan yakni efektif dan efisien. Dalam konteks penataan kelembagaan, SDM dapat mempengaruhi kelembagaan yang dibentuk. SDM yang mempunyai kualitas akan menerapkan pola manajemen secara profesional, dari awal proses perekrutan hingga akhir (pensiun).

Menurut Dessler (dalam Dawud, 2006) manajemen sumber daya manusia (MSDM) didefinisikan sebagai *the linking of Human Resources Management with strategic role and objectives in order to improve business performance and develop organisational cultures and foster innovation and flexibility*. Dalam perspektif keilmuan dan pendekatan strategis, SDM tidak hanya dianggap sebagai tool management, tetapi juga menjadi sumber keunggulan kompetitif dan elemen kunci yang sangat penting untuk meraih kesuksesan dan pencapaian tujuan organisasi. Alwi (dalam Daud, 2006) mengatakan bahwa MSDM mencakup aspek-aspek yang lebih luas dalam hubungan karyawan dan organisasi. MSDM memiliki fungsi perencanaan, rekrutmen, seleksi, pelatihan, pengembangan, dan penilaian kerja.

3. Keuangan

Dalam aspek ini, kelembagaan harus mengetahui kemampuan daerah dan mampu mempertimbangkan pengeluaran biaya. Apabila semakin besar suatu lembaga maka dana alokasi untuk membiayai lembaga juga semakin besar. Sehingga diharapkan kelembagaan dapat :

- a. Mengurangi pemborosan dan efisiensi dana, oleh karena itu kelembagaan harus mempertimbangkan aspek keuangan (pendapatan dan pengeluaran) dan manfaat yang dihasilkan.

- b. Membentuk organisasi horizontal dan vertikal, agar mampu mengalokasikan sumber dana secara efisien. Dana yang tersedia harus dialokasikan secara baik agar alokasi dana tersebut cukup untuk menjalankan tugas.
- c. Mendorong tingkat kreativitas, kewiraswastaan, dan inisiatif di sektor publik
- d. Meningkatkan transparansi keuangan kepada masyarakat agar masyarakat mengetahui yang dibelanjakan pemerintah dapat memberi manfaat dan nilai tambah bagi masyarakat. Pemerintah juga harus meningkatkan kualitas program yang akan dilaksanakan dengan meningkatkan akuntabilitasnya karena masyarakat selalu menyoroti kerja yang telah, sedang, dan akan dilakukan.

4. Teknologi

Dalam perkembangan teknologi sarana dan prasarana kerja dinilai cepat, sehingga dalam proses terjadi peningkatan kualitas kerja yang cukup signifikan. Salah satu faktor pendukung dalam aspek ini adalah *electronic government (e-government)*. Berikut keuntungan penerapan *e-government* menurut *Microsoft E-Government Strategy* (dalam Dawud, 2006) :

- a. Nilai tambah dalam peningkatan pelayanan, karena lebih cepat, akurat, dan terpadu
- b. Sarana proses pembelajaran masyarakat

- c. Membangun relasi dengan masyarakat untuk meningkatkan kepercayaan terhadap pemerintah
- d. Perkembangan informasi memunculkan isu-isu aktual yang menuntut adanya kebijakan
- e. Meningkatkan partisipasi dalam mendukung demokrasi

5. Kebutuhan Pelayanan

Di setiap daerah memiliki potensi yang berbeda-beda, sehingga di masing-masing daerah pula dapat menyusun kelembagaannya sendiri-sendiri. Terdapat beberapa faktor dalam suatu potensi dan kebutuhan seperti luas wilayah, jumlah penduduk, potensi pemerintah daerah, kebutuhan masyarakat, kompleksitas pekerjaan, potensi masyarakat, dan swasta. Potensi dan kebutuhan dapat menjadi alat bantu untuk memprediksi beban pekerjaan yang harus dilaksanakan di suatu daerah.

6. Nilai Strategis Daerah

Aspek nilai strategis juga dapat menjadi pertimbangan dalam penataan kelembagaan daerah. Dalam penyusunan kelembagaan, perlu memperhatikan sektor-sektor yang menjadi unggulan.

1.6.2. Pemerintah Desa

A. Definisi Pemerintah Desa

Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Bab 1, Pasal 1 dan Ayat 3 tercantum bahwa pemerintah desa merupakan kepala desa yang disebut dengan nama lain dibantu

oleh perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa. Supriadi (2015) menyatakan bahwa pemerintah desa merupakan simbol formal dari keseluruhan masyarakat desa. Sedangkan menurut Atmaja (2016) Pemerintahan Desa merupakan penyelenggara urusan pemerintahan oleh pemerintah desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat.

Menurut Heriyanto (2015) pemerintah desa merupakan organisasi dari penyelenggaraan pemerintahan desa yang terdiri atas kepala desa dan perangkat desa selaku unsur pembantu kepala desa. Anwar dan Jatmiko juga mengatakan bahwa pemerintah desa merupakan pemerintahan terendah yang berkedudukan dibawah camat dan mempunyai hak dalam mengatur rumah tangganya sendiri dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

B. Prinsip-prinsip Pemerintah Desa

Heriyanto (2015) mengatakan bahwa dalam pelaksanaan pemerintah desa menggunakan prinsip *good government* yakni meliputi :

1. Profesionalitas, yaitu meningkatkan kemampuan dalam bertindak guna memberikan pelayanan yang cepat, tepat, mudah, dan biaya terjangkau.

2. Akuntabilitas, yaitu meningkatkan etika dan tanggungjawab dalam pengambilan keputusan disetiap bidang yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat.
3. Transparansi, yaitu keterbukaan dalam penyampaian informasi guna memudahkan masyarakat dalam memperoleh informasi.
4. Pelayanan prima, yaitu pelayanan publik yang diselenggarakan dengan prosedur yang baik, biaya murah, ketepatan waktu, akses yang mudah, serta sarana dan prasarana yang memadai.
5. Demokrasi dan partisipasi, yaitu dalam setiap pengambilan keputusan melibatkan masyarakat, agar keputusan dapat sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
6. Efektivitas dan efisiensi, yaitu menjamin terselenggaranya pelayanan yang cepat, tepat, mudah dan biaya terjangkau dengan menggunakan sumber daya secara optimal.
7. Supremasi hukum, yaitu dapat diterima oleh seluruh lapisan masyarakat, mewujudkan penegakan hukum yang adil, menjunjung tinggi nilai Hak Asasi Manusia (HAM) serta memperhatikan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat.

1.6.3. Sistem Informasi Desa (SID)

A. Pengertian Sistem Informasi Desa (SID)

Sistem Informasi Desa (SID) memiliki 2 (dua) arti, yakni dalam arti luas dan arti sempit. Dalam arti sempit SID dimaksudkan dalam sebuah aplikasi yang membantu

pemerintahan desa dalam mendokumentasikan data-data milik desa guna memudahkan proses pencariannya. Sedangkan dalam arti luas, SID diartikan dalam suatu sistem atau rangkaian (mekanisme, prosedur, dan pemanfaatan) (Ranggoaini, dkk., 2012). Selain itu, SID juga merupakan suatu rangkaian dari variasi teknologi informasi dan perangkat lunak (*software*) yang dapat dioperasikan oleh perangkat desa untuk mewujudkan percepatan dan peningkatan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat (Dewi, 2011).

Menurut Ranggoaini, dkk., (2012) terdapat beberapa hal yang mendorong diadakannya SID, antara lain :

1. Inkonsistensi Data

Adanya kebutuhan untuk mengamankan berbagai dokumen di desa berbasis teknologi atau digital. Langkah yang ditempuh adalah dengan memindahkan dokumen dari kertas (*hardfile*) menjadi format digital secara komputerisasi.

2. Sulitnya Akses Data

Adanya suatu kebutuhan untuk memudahkan pencarian data kependudukan dan data desa lainnya secara cepat dan mudah.

3. Keamanan Data

Adanya suatu kebutuhan informasi yang bersifat terbuka (*open source*) dan tidak dipungut biaya agar tidak membebani keuangan desa.

4. Kesatuan Data

Hasil data yang diperoleh dari berbagai pihak (pemerintah) tidak dibagikan kembali ke desa. Berbagai pihak yang melakukan pendataan tersebut juga tidak memiliki indikator yang sama / seragam sehingga data dasar tersebut sulit untuk diolah sebagai kebijakan yang terpadu.

B. Manfaat Sistem Informasi Desa (SID)

Menurut Ranggoaini, dkk., (2012), secara umum terdapat beberapa manfaat penerapan SID antara lain :

1. Perencanaan Pembangunan Desa

Data dasar kependudukan yang dijadikan dasar penentuan perencanaan merupakan data yang sangat penting. Seperti dalam kegunaan SID dalam program pencatatan data kependudukan. Dalam hal perencanaan diperlukan jumlah data penduduk di sebuah desa. Penggunaan SID sangat membantu dalam mempercepat dan bersifat akurat dalam penemuan data. Namun, pada beberapa desa yang belum mengaplikasikan SID masih kesulitan dan membutuhkan waktu yang lama dalam memperoleh data. Hal tersebut dikarenakan memiliki proses yang masih manual atau konvensional sehingga membutuhkan ketelitian yang sangat tinggi.

2. Keterbukaan Informasi

Dalam bentuk praktik demokrasi, setiap warga negara berhak mengetahui rencana proses pembuatan kebijakan. SID dimaksudkan untuk memberikan manfaat ruang dan akses bagi masyarakat desa untuk mencapai tujuan-tujuan tersebut.

3. Pendataan Kesejahteraan Sosial Ekonomi Warga

Pemanfaatan SID di beberapa desa merupakan untuk kepentingan olah data pemetaan kesejahteraan sosial ekonomi secara partisipatif dengan indikator lokal. Praktiknya menunjukkan bahwa desa melakukan pemetaan kemiskinan dengan mudah dikategorikan. Data ini kemudian menjadi dokumen desa yang digunakan untuk verifikasi data dari pemerintah maupun non-pemerintah.

4. Peningkatan Pelayanan Dasar

Tidak tersedianya data yang akurat serta penggunaan sistem yang manual dalam membangun data dapat mengakibatkan pelayanan yang lama. Bagi desa yang telah menerapkan SID, hampir seluruh aspek pelayanan publik menjadi cepat dan akurat seperti dalam mengurus surat-menyurat dan lain-lain sehingga dapat memangkas pemborosan waktu.

5. Penanggulangan Kebencanaan

Pemanfaatan SID di wilayah rawan bencana digunakan untuk membangun basis kependudukan dan pemetaan potensi penanggulangan bencana. Desa rawan bencana dapat bekerjasama dengan desa penyangga (desa aman terdekat dari wilayah bencana) untuk membangun basis data bersama tentang keadaan yang terkait dengan kebencanaan. Misalnya basis data inventarisasi jalur evakuasi, titik kumpul, persebaran lokasi penampungan korban bencana, membuat *database* tentang jumlah, identitas dan karakteristik, dan lain sebagainya. Sehingga apabila terjadi bencana, hal tersebut dapat membantu dalam menyediakan informasi dan mempermudah koordinasi penanganan bencana.

1.6.4. *Electronic Government (E-Government)*

A. *Pengertian E-Government*

Menurut Bank Dunia (dalam Kumorotomo, 2009), *“e-government refers to the use by government agencies of information technologies (such as Wide Area Network, the Internet, and mobile computing) that have the ability to transform relations with citizens, businesses, and other arms of government”*. Berdasarkan definisi tersebut, dapat diketahui bahwa *e-government* merupakan penggunaan teknologi informasi

pada lembaga pemerintah maupun lembaga publik. Tujuannya agar relasi dalam tata pemerintahan yang melibatkan sektor swasta, masyarakat dan pemerintah dapat terselenggara dengan lebih efektif, efisien, produktif dan responsif.

Zweers dan Planque (dalam Indrajit, 2002:3) mengemukakan definisi lain *e-government* adalah berhubungan dengan penyediaan informasi, layanan, atau produk yang disiapkan secara elektronik, dengan dan oleh pemerintah, tidak terbatas tempat dan waktu, serta menawarkan nilai partisipasi yang lebih banyak pada seluruh kalangan. Dalam memberikan informasi melalui *e-government*, juga dimaksudkan agar lebih efektif dan efisien dalam hal waktu dan tempat. Tidak ada batasan dalam mengakses informasi yang disediakan. Sehingga dapat menciptakan akuntabilitas yang baik dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Sedangkan Kementerian Informasi dan Komunikasi (dalam Dewi, 2011) mengemukakan bahwa *e-government* merupakan upaya dalam mengelaborasi penyelenggaraan pemerintahan dengan menggunakan kerangka elektronik untuk mewujudkan kualitas layanan yang efektif dan efisien. Sehingga dapat diartikan bahwa *e-government* merupakan penggunaan teknologi informasi yang dapat meningkatkan hubungan antara pemerintah dengan pihak-pihak lain. Penggunaan *e-government* tersebut kemudian

menghasilkan hubungan bentuk baru seperti: G2C (*Government to Citizen*), G2B (*Government to Business Enterprises*), dan G2G (*Inter-agency Relationship*).

B. Manfaat dan Sasaran *E-Government*

Menurut Malkia (dalam Supangkat, 2004:36), *e-government* memiliki beberapa manfaat, antara lain :

1. Meluruskan sasaran pemerintah dalam menjamin kecepatan terhadap respon kebutuhan masyarakat. Sehingga pelayanan kepada masyarakat dapat lebih cepat, akurat, dan lebih baik.
2. Meningkatkan hubungan antara pemerintah, pelaku bisnis, dan masyarakat umum. Adanya hubungan antara berbagai pihak mendorong adanya keterbukaan (transparansi).
3. Pemberdayaan masyarakat melalui teknologi informasi mudah didapatkan.
4. Penyelenggaraan pemerintahan yang lebih efisien. Misalkan dalam koordinasi pemerintahan dapat dilakukan melalui *email* atau bahkan *video conferencing*.
5. Menghapus lapisan dalam manajemen pemerintahan.
6. Memungkinkan masyarakat, bisnis, pemerintah, dan karyawan menemukan informasi dan mendapatkan layanan dari pemerintah secara mudah dan akurat.

Sedangkan sasaran dalam penerapan *e-government* antara lain :

1. Pembentukan jaringan informasi dan transaksi pelayanan publik yang berkualitas dan terjangkau.
2. Pembentukan hubungan interaktif dengan dunia usaha untuk meningkatkan dan memperkuat kemampuan perekonomian menghadapi perubahan dan persaingan perdagangan internasional.
3. Pembentukan mekanisme komunikasi antar lembaga pemerintah serta penyediaan fasilitas bagi partisipasi masyarakat dalam proses pemerintahan.
4. Pembentukan sistem manajemen dan proses kerja yang transparan dan efisien serta memperlancar transaksi dan layanan antar lembaga pemerintah. (Cetak Biru Sistem Aplikasi *E-Government*, 2004:21).

C. Level Pengembangan *E-Government*

Level pengembangan *e-government* terdiri dari 4 level yaitu :

1. Level Informasi

E-government dapat digunakan sebagai sarana publikasi informasi pemerintah secara *online*, misalnya dalam fitur profil, peraturan, dokumen-dokumen, formulir, dan lain-lain.

2. Level Interaksi

E-government dapat menyediakan sarana untuk melakukan interaksi 2 (dua) arah antara pejabat pemerintah dengan masyarakat sebagai pengguna layanan publik, misalnya dalam bentuk sarana untuk menampung keluhan, forum diskusi atau *hotline* nomor telepon, dan *email* pejabat.

3. Level Transaksi

E-government dapat menyediakan sarana transaksi bagi masyarakat dalam menggunakan layanan publik, yaitu transaksi yang melahirkan kesepakatan yang dapat disertai dengan pembayaran sebagai akibat dinikmatinya layanan publik yang telah digunakan, seperti pajak dan retribusi.

4. Level Integrasi

Semua pelayanan publik yang disediakan oleh pemerintah disamping disediakan secara manual atau konvensional juga disediakan secara *online* melalui *e-government*.

1.7. Definisi Konseptual

1.7.1. Kelembagaan

Lembaga dengan sebutan institusi merupakan suatu bentuk organisasi yang secara tetap tersusun dari pola kelakuan, peranan, dan hubungan (*relation*). Hal tersebut merupakan sebuah cara yang mengikat guna tercapainya berbagai kebutuhan dasar sosial.

1.7.2. Pemerintah Desa

Pemerintah desa merupakan organisasi dari penyelenggaraan pemerintahan desa yang terdiri atas kepala desa dan perangkat desa selaku unsur pembantu kepala desa.

1.7.3. Sistem Informasi Desa (SID)

Sistem informasi desa juga merupakan suatu rangkaian dari variasi teknologi informasi dan perangkat lunak (*software*) yang dapat dioperasikan oleh perangkat desa untuk mewujudkan percepatan dan peningkatan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat.

1.7.4. *Electronic Government (E-Government)*

E-government adalah berhubungan dengan penyediaan informasi, layanan, atau produk yang disiapkan secara elektronik, dengan dan oleh pemerintah, tidak terbatas tempat dan waktu, serta menawarkan nilai partisipasi yang lebih banyak pada seluruh kalangan.

1.8. Definisi Operasional

1.8.1. Kelembagaan

Menurut Dawud (2006) aspek-aspek dalam penataan kelembagaan sebagai berikut :

1. Kewenangan
 - a. Kewenangan pembuatan kebijakan oleh pemerintah.

- b. Kewenangan dilaksanakan secara bersama-sama (pemerintah, swasta, dan masyarakat).
 - c. Pemilahan kewenangan dibiayai berdasarkan tanggungjawab *stakeholder* yang terlibat.
2. Sumber Daya Manusia
- a. Kapasitas SDM dalam penataan lembaga pemerintah desa berbasis *e-government*.
 - b. Pengaruh SDM dalam kelmbagaan yang dibentuk.
3. Keuangan
- a. Lembaga pemerintah melakukan pertimbangan keuangan fiskal.
 - b. Peningkatan transparansi keuangan publik.
4. Teknologi
- a. Perkembangan sarana dan prasarana di lembaga pemerintah desa dalam meningkatkan kualitas kerja.
 - b. Pelaksanaan aspek teknologi dipengaruhi oleh *e-government*.
5. Kebutuhan Pelayanan
- a. Lembaga pemerintah melaksanakan pelayanan publik sesuai dengan potensi wilayah dan kebutuhan masyarakat.

1.9. Metode Penelitian

1.9.1. Jenis Penelitian

Penelitian kualitatif menurut Moleong (2016:6) adalah merupakan penelitian yang dimaksudkan untuk memahami kejadian yang dialami oleh subjek penelitian, misalnya perilaku, persepsi, motivasi, dan tindakan dengan mendeskripsikan dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah. Penelitian kualitatif merupakan jenis penelitian sangat tepat untuk digunakan dalam penelitian ini, karena penelitian ini dapat memberikan kesempatan besar kepada peneliti untuk memfokuskan permasalahan yang akan diteliti secara mendalam. Dengan kata lain penelitian deskriptif merupakan suatu penelitian yang memusatkan perhatian dalam berbagai masalah yang terjadi ketika pelaksanaan penelitian, karena hal ini bertujuan untuk memperoleh data yang relevan dan objektif. Penelitian ini mencoba mendeskripsikan dan menganalisis mengenai proses penerapan SID, pelibatan *stakeholders*, mekanisme pelayanan berbasis SID, efektivitas anggaran, serta terpenuhinya fasilitas dan pengimplementasian SID di Desa Murtigading.

1.9.2. Lokasi Penelitian

Menurut Nasution (2003:43) menyatakan bahwa lokasi penelitian mempunyai ciri atau unsur yang terdapat didalamnya, antara lain unsur pelaku, unsur tempat, dan unsur kegiatan observasi. Lokasi penelitian merupakan objek dalam penelitian dimana peneliti melaksanakan kegiatan penelitian untuk memperoleh data secara relevan dan objektif. Lokasi penelitian yakni di Lembaga Pemerintah Desa Murtigading, Kecamatan Sanden, Kabupaten Bantul.

1.9.3. Unit Analisis Data

Unit analisa data menurut Hamidi (2010:75-76) merupakan suatu unit satuan yang dapat diteliti dalam suatu individu, kelompok maupun suatu latar peristiwa sosial, seperti aktivitas dari individu maupun kelompok sebagai subjek. Dalam menetapkan kriteria terhadap responden, hasil mengenai “apa” dan “siapa” akan diperoleh, sehingga penelitian membutuhkan subjek penelitian atau narasumber. Terdapat 6 unit analisis data dari penelitian ini, yakni 5 narasumber dari Pemerintah Desa Murtigading dan 1 dari BPD Murtigading. Berikut merupakan unit analisis data penelitian agar memperoleh data yang relevan :

Tabel 1.2. Unit Analisis Data

No.	Narasumber	Jabatan	Teknik Pengumpulan Data	Jumlah
1.	Drs. Sutrisno	Kepala Desa Murtigading	Wawancara	1 orang
2.	Nur Raharjo, S.Pd	Ketua BPD Murtigading	Wawancara	1 orang
3.	Bagus Sulaksono, Amd	Sekretaris Desa Murtigading	Wawancara	1 orang
4.	Drs. Joko Triyanto	Kepala Urusan Keuangan Desa Murtigading	Wawancara	1 orang
5.	Fatimah Nur Hayati	Pengelola Sistem Informasi Desa Murtigading	Wawancara	1 orang
6.	Ambarwati	Pengelola SISKEUDES Murtigading	Wawancara	1 orang

1.9.4. Teknik Pengumpulan Data

Dalam pengumpulan data yang berkaitan dengan judul penelitian ini, maka peneliti menggunakan teknik wawancara. Adapun dokumentasi dan triangulasi data digunakan sebagai teknik pelengkap. Berikut penjelasannya :

a. Wawancara

Menurut Moleong (2016:186) wawancara merupakan suatu bentuk percakapan yang dilakukan oleh 2 (dua) pihak untuk mendapatkan informasi tertentu. Pihak yang mengajukan pernyataan disebut *interviewer* (pewawancara) sedangkan pihak yang akan memberikan jawaban atas pertanyaan tersebut disebut *interviewee* (pihak yang di wawancara). Wawancara dilakukan secara langsung dengan perangkat desa di Desa Murtigading untuk mendapatkan data yang berhubungan dengan pertanyaan penelitian melalui pedoman wawancara. Wawancara dilakukan

kepada subjek penelitian yang berjumlah 6 orang yakni Kepala Desa atau Lurah Desa Murtigading, Sekretaris Desa atau Carik Desa Murtigading, Ketua BPD Murtigading, Kepala Urusan Keuangan Desa Murtigading, SDM Pengelola SID, dan SDM Pengelola SISKEUDES.

b. Dokumentasi

Menurut Arikunto (2006) mendefinisikan bahwa metode dokumentasi adalah mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, notulen rapat, dan agenda. Dokumen-dokumen tersebut merupakan dokumen yang berkenaan dengan faktor yang mendasari implementasi SID dan penataan organisasi. Dalam penelitian ini sumber data didokumentasikan dengan melakukan pengumpulan dan pengkajian terhadap penelitian-penelitian terdahulu, dokumen-dokumen seperti RPJMDes; RKPDes; Peraturan Desa, APBDes; dan tata organisasi dan pemerintahan di Desa Murtigading, kebijakan pemerintah terkait dengan SID, dan informasi terkait Desa Murtigading.

1.9.5. Jenis Data

a. Data Primer

Arikunto (2006) menyebutkan bahwa data primer adalah data dalam bentuk verbal atau kata-kata yang diucapkan secara lisan, gerak-gerik atau perilaku yang dilakukan oleh subjek yang dapat

dipercaya, yakni subjek penelitian atau informan yang berkenaan dengan variabel yang diteliti atau data yang diperoleh dari responden secara langsung. Terdapat 13 data primer yang dibutuhkan dalam penelitian penataan lembaga pemerintah des berbasis *e-government* di Desa Murtigading. Berikut data primer yang dibutuhkan dalam penelitian :

Tabel 1.3. Data Primer

No.	Nama Data	Sumber Data	Teknik Pengumpulan Data
1.	Mekanisme atau simulasi Sistem Informasi Desa	Pengelola SID	Wawancara
2.	Perkembangan atau efektifitas Sistem Informasi Desa	Pengelola SID	Wawancara
3.	Kegunaan Sistem Informasi Desa	Pengelola SID	Wawancara
4.	Hal-hal yang sudah dilakukan menggunakan Sistem Informasi Desa	Pengelola SID	Wawancara
5.	Kapasitas Sumber Daya Manusia	Sekretaris Desa	Wawancara
6.	Jobdesk dan jumlah Sumber Daya Manusia	Sekretaris Desa dan Pengelola SID	Wawancara
7.	Rincian anggaran program Sistem Informasi Desa	Kepala Urusan Keuangan dan Pengelola SISKEUDES	Wawancara
8.	Monitoring dan evaluasi keuangan	Kepala Urusan Keuangan dan Pengelola SISKEUDES	Wawancara
9.	Kebutuhan sarana dan prasarana	Sekretaris Desa	Wawancara
10.	Mekanisme pelayanan berbasis Sistem Informasi Desa	Sekretaris Desa	Wawancara
	Realisasi pelayanan berbasis Sistem Informasi Desa	Sekretaris Desa	Wawancara
11.	Hambatan dalam pelaksanaan program Sistem Informasi Desa	Sekretaris Desa	Wawancara
12.	Mekanisme penampung aspirasi	Ketua BPD	Wawancara
13.	Posisi masyarakat setelah penerapan program	Ketua BPD dan Kepala Desa	Wawancara

b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan yang digunakan berupa data tertulis yang diperoleh dari berbagai sumber yang berkaitan dengan tujuan penelitian. Data sekunder digunakan untuk melengkapi data primer dan untuk keperluan pembahasan. Terdapat 5 data sekunder yang dibutuhkan untuk melengkapi data primer. Berikut data sekunder yang dibutuhkan dalam penelitian :

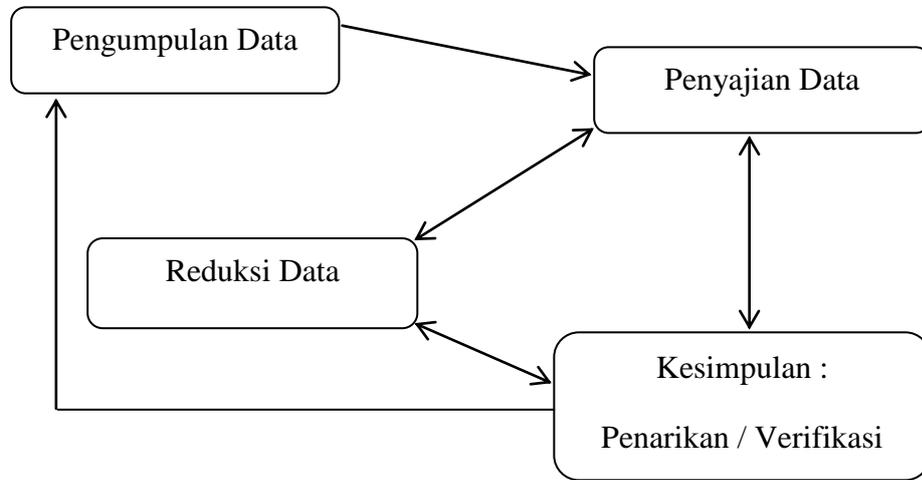
Tabel 1.4. Data Sekunder

No.	Nama Data	Teknik Pengumpulan Data
1.	Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Murtigading Tahun 2017-2022	Dokumentasi
2.	Peraturan Desa Murtigading No 04 atahun 2016	Dokumentasi
3.	Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2015-2017	Dokumentasi
4.	Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2017	Dokumentasi
5.	Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa Tahun 2016	Dokumentasi

1.9.6. Analisis Data

Penelitian ini merupakan penelitian dengan sebuah pendekatan kualitatif. Menurut Sugiyono (2007:92-99) terdapat komponen dalam beberapa langkah analisis data kualitatif yang diterapkan. Berikut merupakan bagan dan penjelasan mengenai langkah analisis data yang diterapkan :

Bagan 1.1. Komponen Analisis Data Kualitatif



a. Reduksi Data

Reduksi data dilakukan dengan cara pemilihan tentang relevan tidaknya antara data dengan tujuan penelitian. Informasi dari lapangan sebagai bahan mentah diringkas, disusun lebih sistematis, serta diperlihatkan pokok-pokok yang penting sehingga lebih mudah dikendalikan. Langkahnya ialah memetakan dan mensinkronkan jawaban narasumber dengan pertanyaan yang diajukan, misalnya pertanyaan yang bertujuan mendapatkan jawaban perihal motif akan dipilah jawaban yang sesuai sebagai bahan analisa. Bila jawaban tidak sesuai dari pertanyaan, maka jawaban tersebut disimpan sebagai perbandingan atau triangulasi data (mengecek kebenaran data).

Seluruh data yang diperoleh dari hasil wawancara, dokumentasi, dan observasi mengenai proses penerapan SID,

pelibatan *stakeholders*, mekanisme pelayanan berbasis SID, efektivitas anggaran, terpenuhinya fasilitas SID di Desa Murtigading. Maka selanjutnya data dapat didokumentasikan dalam bentuk transkrip wawancara, catatan hasil pengamatan *review* ketentuan peraturan terkait dengan fokus penelitian. Reduksi data dapat berlangsung secara terus menerus selama penelitian dan merupakan bagian dari analisis.

b. Penyajian Data

Penyajian data digunakan untuk melihat gambaran keseluruhan atau bagian-bagian tertentu dari gambaran keseluruhan. Pada tahap ini peneliti berupaya untuk mengklasifikasikan dan menyajikan data sesuai dengan pokok permasalahan yang diawali dengan pengkodean pada setiap sub pokok permasalahan mengenai penataan lembaga pemerintah desa berbasis *e-government* di Desa Murtigading. Pengkodean berisi informasi-informasi, baik dari sumber primer dan sekunder yang memiliki hubungan dengan latar, topik, dan subjek penelitian. Langkah ini kemudian dilakukan dengan cara mencocokkan teori yang dipakai dan temuan data di lapangan. Pengkodean atau pengelompokan ini dilakukan untuk memilah jawaban yang sama atau hampir sama antar satu narasumber dan narasumber yang lain dalam kesatuan pertanyaan yang sama.

Dalam penyajian data, data (hasil wawancara) dari narasumber, dan dokumen lain dikelompokkan menjadi beberapa data sekunder dan primer yang berhubungan dengan topik penelitian. Setelah mensinkronkan data atau jawaban yang diberikan narasumber dan dikelompokkan menjadi beberapa bagian, kemudian data (baik tertulis atau tidak tertulis) dan jawaban narasumber disajikan sesuai dengan *resume* masalah dan teori yang dipakai. Penelitian ini dapat memuat data terkait hasil penelitian dan temuan lapangan yang telah diolah sesuai dengan fokus penelitian. Selain itu data yang disajikan berkaitan dengan informasi terkait pra penerapan dan pasca penerapan SID di Desa Murtigading.

c. Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi Data

Penarikan kesimpulan dilakukan dengan jalan membandingkan kesesuaian pernyataan dari subjek penelitian dengan makna yang terkandung dengan konsep-konsep dasar dalam penelitian ini. Sedangkan verifikasi dimaksudkan agar penilaian tentang kesesuaian data dengan maksud yang terkandung dalam konsep-konsep dasar dalam penelitian ini lebih tepat, komprehensif, dan objektif. Penarikan kesimpulan dan verifikasi dilakukan setelah membandingkan data yang dipilih sesuai dengan topik penelitian, kemudian data yang telah dikelompokkan sesuai tinggi rendahnya jawaban narasumber

dianalisa dengan metodologi dan menggabungkan dengan sumber lain yang relevan. Selain penyesuaian dengan metode, data yang telah dianalisis tersebut disesuaikan lagi (verifikasi) dengan data dari sumber lain yang relevan untuk menjadi sebuah tulisan utuh.

Dalam tahap terakhir ini, seluruh pembahasan dari data dan informasi hasil temuan lapangan mengenai penataan lembaga pemerintah desa berbasis *e-government* di Desa Murtigading dapat dirumuskan dalam bentuk jawaban singkat berdasarkan atas rumusan masalah penelitian. Kesimpulan harus diverifikasi secara terus menerus selama penelitian berlangsung. Sehingga saran dan kesimpulan dari hasil penelitian dapat digunakan untuk pengembangan konsep-konsep penelitian selanjutnya.